BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2015 adalah awal tahun diberlakukannya MEA. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah sebuah masyarakat yang saling terintegrasi dan memiliki keterkaitan satu sama lain dimana akan muncul perdagangan bebas diantara negara-negara anggota Asean yang sebelumnya telah membuat kesepakatan bersama dengan pemimpin negara-negara Asean untuk mengubah Asean menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dari segi bidang perekonomian. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia mengatakan semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau pasar bebas Asean, menjadi berkah bagi sektor bisnis di tanah air. Sebab, Indonesia terus dibanjiri oleh investasi asing dan permintaan kerja sama perdagangan (http://merdeka.com, 2016).

Diberlakukannya MEA akan memberikan keuntungan tersendiri terhadap masing-masing negara anggota. Di Indonesia, perusahaan dapat memperluas bisnisnya tanpa ada batasan ruang antar sesama negara anggota dan dapat menarik investor dari para pemodal Asean. Perusahaan yang memiliki nilai yang baik cenderung akan lebih menarik perhatian para investor/kreditur karena nilai perusahaan yang baik akan membuat para investor/kreditur percaya pada kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan para investor adalah dengan

memberikan informasi dalam bentuk pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan tahunan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan maupun non keuangan, dimana, informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan dan tindakan dari para *stakeholders*, yang diantaranya adalah manajemen, investor, kreditur, pegawai, pemasok, dan regulator. Berdasarkan jenisnya, pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dibagi menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Pancawati, 2008).

Penelitian dari Rouf (2011) mengatakan bahwa di Bangladesh, baik UU Perusahaan dan Sekuritas & Peraturan Pertukaran mengatur pengungkapan perusahaan oleh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di DSE. Di Bangladesh, UU Perusahaan tahun 1994 dan Sekuritas & Peraturan Pertukaran tahun 1987 adalah dua peraturan perundang-undangan penting bagi pengungkapan perusahaan. UU Perusahaan tahun 1994 memberikan persyaratan dasar untuk pengungkapan dan pelaporan yang berlaku untuk semua perusahaan yang tergabung di Bangladesh (Pemerintah Bangladesh, 1993). UU mengharuskan perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan dalam rangka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari negara perusahaan yang bersangkutan. Sekuritas dan Komisi Bursa (SEC), badan pengawas lain, mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar untuk mematuhi standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB), dalam rangka penyediaan pengungkapan sendiri (Pemerintah Bangladesh, 1993). Ketentuan

pengungkapan Peraturan Sekuritas Bursa, pada kenyataannya, dibatasi hanya untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

Fenomena dari penelitian Abdullah dan Ismail (2008) menunjukkan sejalan dengan meningkatnya kecanggihan operasi bisnis, pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan menjadi lebih penting untuk masyarakat bisnis dalam membuat keputusan. Pengungkapan sukarela melayani banyak peran kepada pengguna laporan keuangan. Banyak perusahaan saat ini secara sukarela mengungkapkan informasi untuk alasan yang berbeda. Di Malaysia, keterbukaan informasi sukarela dalam laporan tahunan didorong oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). MASB 1 (Penyajian Laporan Keuangan) mendorong masuknya ulasan keuangan dan informasi tambahan dalam akun tahunan.

Fenomena lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Barako (2007). Barako meneliti sejauh mana atribut tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan mempengaruhi pengungkapan sukarela berbagai jenis informasi. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di Kenya. Dimana dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kenya telah memulai reformasi di Bursa Efek Nairobi bertujuan mengubah bursa menjadi kendaraan untuk memobilisasi tabungan domestik dan menarik investasi modal asing. Akibatnya, pelaporan keuangan perusahaan, dan khususnya, tingkat pengungkapan sukarela adalah bagian penting dari proses untuk membangun kepercayaan investor (lokal dan asing) dan kepercayaan.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah diwajibkan oleh standar atau peraturan badan pengawas, di Indonesia peraturan di keluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang OJK). Di Indonesia, pengungkapan wajib telah di atur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang di lakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa di wajibkan oleh standar atau peraturan badan pengawas (Bapepam) atau pengungkapan melebihi dari yang di wajibkan (Rr. Puruwita, 2012). Kedua jenis pengungkapan ini dapat di temukan di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan tahunan adalah salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*). Laporan tahunan berisi tentang laporan perkembangan dan pencapaian yang telah berhasil di raih oleh perusahaan (Made, 2013). Dimana, laporan tahunan ini terdiri dari laporan keuangan dan kinerja perusahaan selama satu tahun. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi yang berguna kepada *stakeholders* mengenai kegiatan operasional perusahaan. Laporan tahunan ini adalah bentuk pertanggung jawaban dari manajemen mengenai pengelolaan perusahaan kepada investor. Manajemen dan investor adalah dua pihak terpisah yang memiliki kepentingan berbeda terhadap laporan keuangan (Rr. Puruwita, 2012). Manajemen sebagai pengelola transaksi keuangan perusahaan akan

memilih kebijakan akuntansi dengan dasar penilaian dan kepentingan yang bersifat subjektif sesuai dengan kepentingannya. Jadi, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dengan penilaian dan kepentingan yang berbeda sehingga laporan keuangan bisa dikatakan tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai media komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.

Luas pengungkapan informasi harus ditentukan karena terlalu banyaknya tingkat pengungkapan informasi akan sama tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikitnya pengungkapan informasi. Luas pengungkapan sukarela suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ukuran perusahaan, *leverage*, porsi kepemilikan publik, *return on investment* (ROI), dan ukuran KAP. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui aktiva yang dimiliki oleh persahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar, akan mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. *Leverage* adalah aktiva yang dimiliki perusahaan yang berasal dari hutang atau modal yang berasal dari kreditur. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah. Kepemilikan saham perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaan adalah saham yang dimiliki oleh publik atau sejumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan yang tingkat kepemilikan publiknya tinggi akan memberikan pengungkapan yang tepat waktu dan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik.

Return on investment (ROI) atau rasio pengembalian atas investasi adalah salah satu alat ukur profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih sesudah pajak dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROI perusahaan, maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan, maka diharapkan akan semakin luas pula pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumah klien dan prosentasi dari *audit fees*. Profesi akuntan adalah profesi kepercayaan yang diharapkan akan memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan. Perusahaan yang laporan keuangannya di audit oleh auditor dari kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi (*big four accounting firms*) akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pula. Dengan begitu, penggunaan auditor dari KAP juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan perusahaan.

Penelitian mengenai pengungkapan sukarela telah sering dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian sejenis ini telah dilakukan diantaranya oleh Erna (2013), Made (2013), Rouf (2011), Rofika dan Mustika (2011), Abdullah& Ismail (2008) dan Barako (2007). Namun, pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil yang beragam dalam meneliti pengungkapan sukarela, diantaranya penelitian Abdullah & Ismail (2008) menunjukkan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Made (2013) dan Rofika dan Mustika (2011) yang menunjukkan bahwa rasio *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Porsi kepemilikan saham publik dibuktikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela oleh Rofika dan Mustika (2011) berbeda dengan hasil penelitian Erna (2013) yang menunjukkan hasil berpengaruh. Selanjutnya pada penelitian yang menggunakan variabel penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasilnya menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela yang didasari pada penelitian Erna (2013) dan Rofika dan Mustika (2011) berbeda dengan hasil penelitian Made (2013) dan Barako (2007) yang menunjukkan penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten tersebut menunjukkan adanya *research* gap dan membuat penelitian mengenai pengungkapan sukarela ini menarik untuk diteliti kembali dengan menjadikan perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul **"Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik, ROI, dan Ukuran KAP terhadap Luas Pengungkapan Sukarela".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela?
3. Apakah Porsi Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela?
4. Apakah *Return On Investment* (ROI) berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela?
5. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik, ROI dan Ukuran KAP terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti:

Seluruh tahapan serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik, ROI dan Ukuran KAP terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Manfaat bagi STIE Perbanas:

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu Akuntansi, dan juga berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik, ROI dan Ukuran KAP terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Manfaat bagi masyarakat:

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui pengaruh pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik, ROI dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, perumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literature.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis frekuensi, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.